

Menlu Arab Saudi Minta Palestina-Israel Utamakan Perundingan

written by Harakatuna



Harakatuna.com. Riyadh - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud mengatakan fokus upaya [perdamaian](#) Palestina-Israel harus membawa kedua belah pihak kembali ke meja perundingan. Usai perundingan, baru setelahnya dilakukan normalisasi hubungan.

“Kami selalu membayangkan bahwa normalisasi akan terjadi. Tetapi kami juga perlu memiliki negara Palestina dan kami perlu memiliki rencana perdamaian Palestina-Israel,” kata Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, seperti dikutip Al-Monitor, Jumat 16 Oktober 2020.

“Saya percaya bahwa fokus sekarang perlu untuk membawa Palestina dan Israel kembali ke meja [perundingan](#). Pada akhirnya, satu-satunya hal yang dapat mewujudkan perdamaian abadi dan stabilitas abadi adalah kesepakatan antara Palestina dan Israel, ”katanya dalam acara virtual yang diselenggarakan oleh Institut Washington.

Pangeran Faisal berada di Washington minggu ini untuk dialog perdana isu strategis AS-Arab Saudi. Selama pidato bersama dengan mitranya dari Arab Saudi

pada Rabu 14 Oktober, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berharap Riyadh akan mempertimbangkan untuk mencapai kesepakatannya sendiri dengan Israel.

Pada September lalu, Uni Emirat Arab dan Bahrain sepakat untuk normalisasi hubungan dengan Israel berdasarkan kesepakatan Abraham Accord yang dimediasi AS. Presiden Donald Trump mengatakan dia mengharapkan “lima atau enam” negara, termasuk Arab Saudi, untuk segera membuat kesepakatan normalisasi mereka sendiri.

Di bawah perjanjian baru-baru ini, Israel setuju untuk menangguk rencana untuk secara resmi mencaplok sebagian besar Tepi Barat. “Menghapus ancaman aneksasi membantu ‘meletakkan dasar’ bagi Palestina dan Israel untuk kembali ke meja perundingan,” Menlu Faisal.

Pangeran Faisal telah mengatakan sebelumnya bahwa Arab Saudi masih berkomitmen pada Prakarsa Perdamaian Arab 2002. Pakta yang ditengahi Arab Saudi itu menyerukan agar pengakuan ditawarkan hanya dengan imbalan status kenegaraan bagi Palestina dan penarikan penuh Israel dari wilayah yang diduduki sejak 1967.